

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA) KAB.KEBUMEN TA 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. LANDASAN HUKUMPENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen NomorTahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor);
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 21 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

C. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD	
	3.1	Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD :
		3.1.1 LRA
		3.1.2 L O
		3.1.3 Neraca
		3.1.4 LPE
		3.1.5 CALK
	3.2	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas yang menggunakan basis akrual.
Bab IV	Penjelasan dan informasi-informasi non keuangan	
Bab V	Penutup	

BAB II
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

a. Pendapatan

Realisasi Pendapatan – LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2019 sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 mencapai sebesar Rp 9.528.914.228,00 atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp 10.448.751.000,00 dan mengalami *penurunan sebesar 4,82%* dikarenakan ada kegiatan yang gagal lelang sebesar Rp 197.300.000,00 yaitu pada Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan dan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten Semua Daerah Irigasi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk studi banding pada Kegiatan Penetapan RPJPD sebesar Rp 97.930.100,00 tetapi tidak dilaksanakan.

Tabel berikut menunjukkan realisasi pendapatan yang dicapai.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA

No	Jenis Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Lebih / (Kurang) (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1.	DAU	10.448.751.000	9.528.914.228	919.836.772	91,20	96,01
2.	HIBAH IPDMIP	81.274.541	81.274.541	0	100	-
3.	BANPROV	295.000.000	281.916.672	13.083.328	95,56	97,44

b. Belanja

Realisasi Belanja TA 2019 sebesar Rp 9.528.914.228,00 dan anggaran sebesar Rp 10.448.751.000,00 atau mencapai 91,20%. Dan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 9.607.955.398,00 realisasinya mengalami penurunan sebesar 4,82%.

1. Realisasi Belanja Per Akun

Rician realisasi belanja per akun disajikan sebagai berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	ANGGARAN T.A. 2019	REALISASI T.A. 2019	PROSENTASE %
B. BELANJA			
Belanja Operasi			
1. Belanja Pegawai	5.153.726.000	4.820.916.046	93,54
2. Belanja Barang	5.094.259.000	4.516.504.782	88,66
3. Belanja Hibah	81.274.541	81.274.541	100,00
Jumlah Belanja Operasi	10.247.985.090	9.337.420.828	95,38
Belanja Modal			
1. Belanja Modal Tanah	-	-	
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.766.000	191.493.400	95,38
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	
4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	
Jumlah Belanja Modal	200.766.000	191.493.400	91,56
JUMLAH BELANJA	10.448.751.000	9.528.914.228	91,20

2 Realisasi Belanja per kegiatan

URAIAN JENIS BELANJA per kegiatan	ANGGARAN T.A. 2019	REALISASI T.A. 2019	PROSENTASE %
Program Perencanaan Tata Ruang	198.040.000	195.111.533	98,90
Kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang	198.040.000	195.111.533	98,90
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	167.844.000	160.889.594	95,85
Keg. Koord. Perumusan Kebijakan & Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya2 Gulkin & Penurunan Kesenjangan	167.844.000	160.889.594	95,85
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	49.060.000	48.716.650	99,30
Keg. Koord. Pengendalian Data Statistik Daerah	49.060.000	48.716.650	99,30
Program Pelayanan Administrasi	1.171.096.000	1.041.001.685	88,89

Perkantoran			
Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.475.000	2.470.000	99,79
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	99.020.000	58.481.596	59,06
Keg. Jasa Pemeliharaan & Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	188.285.000	179.691.429	95,43
Keg. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	134.172.000	116.640.126	86,93
Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	99.020.000	96.290.500	97,24
Keg. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	59.559.000	59.318.400	99,59
Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.755.000	24.751.300	99,98
Keg. Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	69.314.000	68.726.450	99,15
Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.892.000	10.823.000	99,36
Keg. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	12.377.000	6.100.000	49,28
Keg. Penyediaan Makanan & Minuman	90.000.000	70.570.700	78,41
Keg. Rapat 2 Koord. & Konsultasi Ke Luar Daerah	346.570.000	329.893.184	95,18
Keg. Rapat 2 Koord. & Konsultasi Dalam Daerah	34.657.000	17.245.000	49,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	414.314.000	404.679.400	97,67
Keg. Pengadaan Mebeleur	24.755.000	21.396.400	86,43
Keg. Pengadaan Sarana & Prasarana Kantor	176.666.000	170.752.000	96,65
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	64.363.000	64.236.000	99,80
Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	19.804.000	19.800.000	99,97
Keg. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung	128.726.000	128.495.000	

Kantor			99,82
Program Pengembangan Data/Informasi	99.020.000	94.569.200	95,50
Keg. Penyusunan & Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dok. Perencanaan	99.020.000	94.569.200	95,50
Program Kerjasama Pembangunan	48.530.000	45.425.586	93,60
Keg. FEDEP	48.530.000	45.425.586	93,60
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	802.062.000	779.152.376	97,14
Keg. PKTAP	356.472.000	337.632.650	94,71
Keg. Koord. Peningkatan Kapasitas PPD	445.590.000	441.519.726	99,08
Program Perencanaan Pemb. Daerah	2.220.716.000	2.009.364.379	90,48
Keg. Penetapan RPJPD	653.294.000	483.158.831	73,95
Keg. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	445.590.000	437.398.396	98,16
Keg. Penetapan RKPD	493.424.000	487.264.692	98,75
Keg. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	148.239.000	135.744.355	91,57
Keg. Penyelenggaraan Krenova	185.169.000	183.881.433	99,30
Keg. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)	295.000.000	281.916.672	95,56
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	383.864.000	537.646.447	93,54
Keg. Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah	130.824.000	126.381.880	96,60
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Sub Bidang Produksi	99.020.000	95.320.906	96,26
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Subbid Distribusi, Jasa & Keuangan	154.020.000	140.506.761	91,22
Program Perencanaan Sosial &	297.060.000	291.737.055	

Budaya			98,20
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Subbid Pemerintahan & Pendidikan	148.530.000	144.927.081	97,57
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Perencanaan Pemb. Subbid Kesra	148.530.000	146.809.974	98,84
Program Perencanaan Prasarana Wilayah & Sumber Daya Alam	826.284.000	613.436.160	74,24
Keg. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam	288.564.000	84.779.281	29,37
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Subbid Pengembangan Wilayah	339.680.000	333.022.756	98,04
Keg. Koord. Perencanaan Pemb. Subbid Infrastruktur & Prasarana Wilayah	198.040.000	195.634.123	98,78
Jumlah Belanja	10.448.751.000	9.528.914.228	91,20

B. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2019 antara lain :

- a. Pendapatan
 1. Pendapatan Rp 10.448.751.000,00 terealisasi sebesar 91,20 % dan tidak mencapai target.
- b. Belanja
 1. Belanja Rp 9.528.914.228,00 tidak terserap Rp 919.836.772,00 dikarenakan ada kegiatan yang gagal lelang sebesar RP 197.300.000,00 yaitu pada Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan Dokumen Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan dan Rencana Pengelolaan dan Pengembangan Irigasi Kabupaten Semua Daerah Irigasi dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah untuk studi banding pada Kegiatan Penetapan RPJPD sebesar Rp 97.930.100,00 tetapi tidak dilaksanakan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

RINCIAN DARI PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. PENDAPATAN

Jumlah anggaran Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp10.448.751.000,00 Terealisasi sebesar Rp9.528.914.228,00 atau 91,20% dari target yang ditetapkan.

B. BELANJA- LRA

Realisasi belanja BAP3DA TA. 2019 adalah sebesar Rp 9.528.914.228,- atau 91,20% dari anggaran sebesar Rp10.448.751.000,- Rincian Anggaran dan realisasi belanja TA.2019 tersaji sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
BELANJA				
Belanja Operasi				
1. Belanja Pegawai	5.153.726.000	4.820.916.046	93,54	4.456.834.980
2. Belanja Barang	5.094.259.000	4.516.504.782	88,66	4.636.555.418
3. Belanja Hibah	81.274.541	81.274.541	100,00	64.503.090
4. Belanja bantuan Sosial				
Jumlah Belanja Operasi	10.247.985.000	9.337.420.828	91,11	9.157.893.488
Belanja Modal				
1. Belanja Modal Tanah	-	-		
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	200.766.000	191.493.400	95,38	514.565.000
3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-		
4. Belanja Modal Jalan Irigasi Jaringan				
5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		

6. Belanja Modal aset tak berwujud				
	200.766.000	191.493.400	95,38	514.565.000
Jumlah Belanja Modal				
JUMLAH BELANJA	10.448.751.000	9.528.914.228	91,20	9.672.458.488

Berdasarkan Tabel di atas Perbandingan Realisasi Belanja TA 2019 dengan TA. 2018 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada TA. 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 143.544.260

Dengan rincian Belanja Operasi mengalami kenaikan sebesar 0,19 % dan Belanja Modal turun 60 %.

a) Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp 4.820.916.046,00 mencapai 93,54 % dari anggaran sebesar Rp 5.153.726.000,00, apabila dibandingkan dengan realisasi 2018 yang sebesar Rp 4.456.834.980,00 mengalami peningkatan sebesar 8,17 %.

Belanja operasi terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah. Adapun rincian realisasi atas Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Hibah TA. 2019 dan 2018 tersaji sebagai berikut :

Adapun rincian realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut :

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Realisasi 2018
1. Belanja Pegawai	5.153.726.000	4.820.916.046	93,54	4.456.834.980
a. Gaji dan Tunjangan				
b. Tambahan Penghasilan PNS				
c. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH				
d. Insentif Pemungutan Pajak Daerah				

e. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah				
f. Uang Lembur				
g. Belanja Honorarium PNS				
h. Belanja Honorarium Non PNS				
2. Belanja barang				
a. Belanja Bahan Pakai Habis Kantor				
b. Belanja Bahan/Material				
c. Belanja Jasa Kantor				
d. Belanja Premi Asuransi				
e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				
f. Belanja Cetak dan Penggandaan				
g. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Par kir				
h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas				
i. Belanja Sewa Alat Berat				
j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
k. Belanja Makanan dan Minuman				
l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				
m. Belanja Pakaian Kerja				
n. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				
o. Belanja Perjalanan Dinas				
p. Belanja Perjalanan Pindah Tugas				
q. Belanja Pemeliharaan				
r. Belanja Jasa Konsultansi				

s. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga				
t. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
u. Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS				
v. Belanja Pegawai BLUD				
w. Biaya Jasa Pihak Ketiga				
x. Belanja Beasiswa peserta didik				
y. Belanja Barang Dan Jasa BLUD				
z. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat				
3. Belanja Hibah				
a. Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat				
b. Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan				
4. Belanja Bantuan sosial				
a. Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan				
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat				
Total Belanja Operasi	5.153.726.000	4.820.916.046	93,54	4.456.834.980

Belanja hibah sebesar Rp81.274.541,00 direalisasikan untuk Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Subbidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah. Sedangkan belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 0,00.

b) Belanja Modal

Belanja Modal	2019		%	Realisasi 2018 (Audited) (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
Belanja Tanah				
Belanja Peralatan dan Mesin	200.766.000	191.493.400	95,38	514.565.000
Belanja Gedung dan Bangunan				
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
Belanja Aset tetap Lainnya				
Belanja Aset Tak Berwujud				
JUMLAH	200.766.000	191.493.400	95,38	514.565.000

Realisasi belanja modal tahun 2019 sebesar Rp191.493.400,- atau tercapai 95,38% dari anggaran sebesar Rp200.766.000,-. Dibandingkan realisasi tahun 2018 yang sebesar Rp514.565.000,00 realisasi belanja modal tahun 2019 turun sebesar 60%.

Adapun rincian realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1. Belanja Tanah			
2. Belanja Peralatan dan Mesin	200.766.000	191.493.400	95,38
3. Belanja Gedung dan Bangunan			
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan			

Belanja modal yang realisasinya tertinggi sebesar 95,38% adalah belanja modal peralatan dan mesin.

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan –LO

Pendapatan - LO Kabupaten Kebumen adalah Pendapatan untuk periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 9.337.420.828,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan – LO

No	Pendapatan – LO	2019(Rp)	2018 (Audited) (Rp)
		9.337.420.828,00	9.437.682.186,00
1	PAD – LO		
2	Transfer – LO		
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah – LO		
	Jumlah	9.337.420.828,00	9.437.682.186,00

Dari tabel diatas dapat diketahui pendapatan LO tahun 2019 menurun sebesar Rp100.261.358,00 atau sebesar 0,10 % dibandingkan tahun sebelumnya.

1. Beban

Realisasi Beban BAPPEDA pada TA.2019 adalah sebesar Rp9.337.420.828,00 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Beban TA 2019 dan 2018

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2018	Penurunan %
BEBAN	9.337.420.828	9.437.682.186	0,10
Beban Operasi	-	-	-
Beban Transfer	-	-	-
Beban Luar Biasa	-	-	-
Total Beban	9.337.420.828	9.437.682.186	0,10

a. Beban Operasi

Beban Operasi tahun 2019 sebesar Rp9.337.420.828,00 terdiri dari:

Realisasi Beban Operasi

No	Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	4.820.916.046	4.456.834.980	8,17
2	Beban Barang dan Jasa	4.516.504.782	4.636.298.653	2,58
3	Beban Bunga			
4	Beban Subsidi			
5	Beban Hibah			
6	Beban Bantuan Sosial			
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		344.548.553	100,00
8	Beban Penyisihan Piutang			
9	Beban Lain - Lain			
	Jumlah	9.337.420.828	9.437.682.186	1,06

Dari tabel diatas dapat diketahui Realisasi LO tahun 2019 menurun sebesar Rp100.261.358,00 atau sebesar 1,06 % dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai BAPPEDA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp4.820.916.046,00

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi BebanBarang Jasa TA 2019 sebesar Rp4.516.504,00

c. Beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 0,00 merupakan penyusutan atas aset tetap dan amortisasi atas aset lainnya berupa Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	Jenis Beban	2019 (Rp)	2018 (Rp)
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	344.548.553
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan		
4.	Beban Penyusutan Aset lainnya		
5.	Beban Amortisasi Aset Tdak Berwujud		
	Jumlah	0	344.548.553

D. NERACA

1. ASET

a. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 2.301.550,- dan Rp 2.301.550,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada BAPPEDA per 31 Desember 2019 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Aset Lancar	TA 2019	TA 2018
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0.00	0.00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0.00	0.00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	0.00	0.00
4	Investasi Jangka Pendek	0.00	0.00
5	Piutang Pendapatan	0.00	0.00
6	Piutang Lainnya	0.00	0.00
7	Penyisihan Piutang	0.00	0.00
8	Beban dibayar di muka	0.00	0.00
9	Persediaan	2.301.550	2.301.550
	Jumlah	2.301.550	2.301.550

1) Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 0,- dan Rp 0,- .

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019

No	SKPD	Nilai (Rp)	Tanggal Penyetoran ke Kas Daerah
1.	BAPPEDA	0	31-12-2019
2.			
3.			

2) Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp2.301.550,- dan Rp 2.301.550,-

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Adapun saldo persediaan sebesar Rp2.301.550,- merupakan saldo persediaan atas bahan habis pakai yang belum habis/belum digunakan sampai dengan tanggal neraca.

NO	PERSEDIAAN	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Audited) (Rp)
1.	Bahan Habis Pakai	2.301.550	2.301.550
2.	Bahan/Material	-	-
3.	Barang Lainnya	-	-
	Jumlah	2.301.550	2.301.550

3) Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 tersaji sebesar Rp1.864.100.280,- dan Rp 1.672.606.880,- Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap BAPP3DA per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada Tabel berikut:

Rincian Aset Tetap

No	Jenis	T.A 2019	T.A. 2018
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	3.052.047.236	2.860.553.836
3	Gedung dan Bangunan	538.786.450	538.786.450
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	245.400.000	245.400.000
5	Aset Tetap Lainnya	18.561.825	18.561.825
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.077.365.636)	(2.077.365.636)
	Jumlah	1.777.429.875	1.585.936.475

a. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 3.052.047.236,- dan Rp 2.860.553.836,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Saldo per 31 Desember 2018	Rp 3.052.047.236
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	Rp -
Mutasi dari SKPD lain	Rp -
Reklas/koreksi tambah Aset	Rp -
Total tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan	Rp -
Rusak Berat	Rp -
Mutasi ke SKPD lain	Rp -
Koreksi	Rp -
Reklas (dari BM Intra ke Ekstra)	Rp -
Total kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 3.052.047.236

b. Gedung dan Bangunan

Nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 538.786.450,- dan Rp 538.786.450,-

Saldo per 31 Desember 2018	Rp 538.786.450
Mutasi tambah:	
Belanja Modal	
Mutasi dari SKPD lain	
Koreksi / Reklas tambah Aset	
Total Tambah	
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	
Rusak Berat	
Mutasi ke SKPD Lain	
Reklas Aset (dari BM Intra ke Ekstra)	
Total Kurang	
Saldo per 31 Desember 2019	Rp 538.786.450

Nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp 538.786.450,- terdiri dari :

No	Uraian Gedung dan Bangunan	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Rp 538.786.450	Rp 538.786.450			Rp 538.786.450
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	Rp 538.786.450	Rp -	Rp -	Rp 538.786.450

c. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 245.400.000,- dan Rp245.400.000,-

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	245.400.000
Mutasi tambah:		
Belanja Modal	Rp	-
Mutasi dari SKPD LAin	Rp	-
Koreksi Tambah/reklas aset	Rp	-
Total Tambah		
Mutasi kurang:		
Penghapusa Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD Lain	Rp	-
Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	245.400.000

d. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp18.561.825,- dan Rp18.561.825,-

Saldo per 31 Desember 2018	18.561.825
Mutasi tambah:	
Belanja Modal 2018	Rp -
Mutasi ke SKPD Lain	Rp -
Koreksi Tambah /reklas aset	Rp -
Total Tambah	

Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD	Rp	-
Koreksi/reklas aset	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	18.561.825

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 18.561.825,- terdiri dari :

No	Uraian	Saldo Awal	Bertambah	Berkurang	Saldo Akhir
1	Aset Tetap Lainnya	Rp 18.561.825	Rp -	Rp -	Rp 18.561.825
2					Rp -
3					Rp -
4					Rp -
	Jumlah	Rp 18.561.825	Rp -	Rp -	Rp 18.561.825

e. Akumulasi Penyusutan Aset

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi pada BAPPEDA TA.2019 dan 2018 adalah sebesar Rp (2.077.365.636) dan Rp (2.077.365.636) BAP3DA tahun 2019 merupakan tahun ke-5 melakukan pelaporan keuangan dari kas basis ke accrual basis, sehingga tahun 2019 merupakan tahun ke-5 dalam melakukan penyusutan.

7. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dalam hal BAPPEDA sebagai SKPD, tidak ada Dana Cadangan pada BAPPEDA untuk tahun 2019.

8. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 84.368.855,- dan Rp 84.368.855,-. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Aset Lainnya BAPPEDA terdiri dari :

a. Aset Tak Berwujud

Nilai Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah

Rp 78.618.800,- dan Rp 78.618.800,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	78.618.800
Mutasi tambah:		
Pembelian Software	Rp	-
Mutasi kurang:		
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	78.618.800

b. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp 5.750.055,- dan Rp 5.750.055,-. Nilai Aset Lain-lain merupakan Aset Tetap yang kondisinya rusak berat yang dimiliki Badan Peencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen. Adapun rincian aset lain-lain sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	Rp	5.750.055
Mutasi tambah:		
Belanja Modal 2018	Rp	-
Mutasi dari SKPD Lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Reklas	Rp	-
Total Tambah	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Penghapusan Aset	Rp	-
Rusak Berat	Rp	-
Mutasi ke SKPD lain	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Total Kurang		
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	5.750.055

1. KEWAJIBAN

a) Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018 tersajisebesar Rp 4.798.631,- dan Rp 4.798.631,-.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
2	Pendapatan diterima Dimuka	-	-
3	Utang Beban	4.798.631	4.798.631
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
Jumlah		4.798.631	4.798.631

2. EKUITAS

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Danaper 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp (2.497.081,-) dan Rp (2.497.081,-)

E. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Ekuitas Awal

Jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.861.798.730,- merupakan reklasifikasi dari ekuitas dana tahun 2019 sebagai berikut:

1. Ekuitas Dana Lancar sebesar	Rp	0,-
2. Ekuitas Dana Investasi sebesar	Rp	1.861.798.730,-
3. Ekuitas Dana Cadangan sebesar	<u>Rp</u>	<u>0,-</u>
Jumlah	Rp	1.861.798.730,-

2. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koreksi Nilai Persediaan
Koreksi nilai persediaan senilai Rp0,-
2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Penilaian kembali aset tetap sebesar Rp 0,-

3. Koreksi Lainnya

Koreksi lainnya senilai Rp 0,00 merupakan koreksi atas pos-pos yang belum dibukukan sampai akhir tahun 2018, terdiri dari:

- Pengakuan atas bunga yang terutang Rp 0,00
- Pengakuan atas beban dibayar dimuka Rp 0,00
- Lain-lain Rp 0,00

BAB IV

PENJELASAN INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS

Berisi domisili dan bentuk hukum suatu entitas, kegiatan operasional serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional.

BAB V
PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019 dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan yang harus dilaksanakan, sebagai konsekuensi dari penggunaan dana APBD, serta sebagai perwujudan akuntabilitas SKPD sebagai sebuah entitas akuntansi/pelaporan.

Kebumen, 31 Desember 2019
PENGGUNA ANGGARAN

Ir. PUDJIRAHJU
Pembina Utama Muda
NIP. 196207131987032005